

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Definisi Impor

Dalam perekonomian terbuka barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang, yaitu barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang yang di impor dari luar negeri. Definisi singkat dari impor adalah pembelian negara atas barang buatan perusahaan-perusahaan dari negara lain atau barang yang di beli dari luar negeri. Barang buatan luar negeri di impor oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor (Sukirno, 2004: 207).

Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif tinggi. Perdagangan luar negeri timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Perbedaan harga bukanlah hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena perbedaan dalam pendapatan dan selera. Apabila persediaan suatu barang di satu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan maka negara tersebut dapat mengimpor dari negara lain (Nopirin, 1997: 2-3).

2.1.1. Teori Merkantilisme

Aliran ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme ini muncul pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18 di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Belanda dan Spanyol. Merkantilisme menyatakan bahwa cara terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Dengan demikian akan terjadi aliran emas masuk ke negara tersebut. Para merkantilis berpendapat bahwa pemerintah harus mendorong ekspor dan membatasi impor, karena jumlah emas dalam suatu waktu adalah tetap, maka suatu negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara-negara lain (Salvatore, 1995: 2).

2.1.2. Teori Perdagangan Internasional Klasik

1. Teori Keunggulan Absolut

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul , *“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”*. Smith berpendapat bahwa dengan perdagangan bebas setiap negara dapat berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan absolut, dan akan mengimpor barang yang mempunyai kerugian absolut. Keunggulan absolut adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada negara-negara lain (Salvatore, 1995: 2).

2. Teori Keunggulan Komparatif

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian absolut dalam memproduksi kedua barang, tetapi perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat dilakukan. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor barang yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari barang inilah negara tersebut memperoleh keunggulan komparatif. Sebaliknya negara tersebut mengimpor barang yang mempunyai kerugian absolut yang lebih besar, karena dari barang inilah negara tersebut memperoleh kerugian komparatif (Salvatore, 1995: 3).

2.1.3. Teori Perdagangan Internasional Modern

1. Teori Heckscher-Ohlin

Teori Heckscher-Ohlin menekankan bahwa perbedaan relatif faktor pemberian alam dan harga faktor produksi merupakan penentu perdagangan yang terpenting, dengan asumsi bahwa teknologi dan cita rasa sama. Teori ini menganggap bahwa setiap negara akan mengekspor barang yang faktor produksinya relatif berlimpah dan murah, serta mengimpor barang yang faktor produksinya relatif langka dan mahal (Salvatore, 1995: 63).

2. Model Siklus Produk

Model ini dikemukakan oleh Raymond Vernon yang menggunakan teori pemasarannya untuk menganalisis terjadinya perdagangan

internasional (ekspor dan impor) antara negara industri maju dengan negara sedang berkembang, dengan mendasarkan pada siklus produk. Berdasarkan model ini terdapat 5 tahapan yang memberikan gambaran perkembangan suatu produk. Menurut model ini, memperkenalkan suatu produk baru biasanya memerlukan tenaga kerja yang sangat terlatih dalam proses produksi. Jika produk sudah baik dan memperoleh pengakuan umum, produksinya menjadi standar, dan hanya memerlukan tenaga kerja yang tidak terlatih. Keuntungan komparatif kemudian bergeser dari negara yang memperkenalkan produk baru tersebut ke negara yang mempunyai tenaga kerja lebih murah (Salvatore, 1995: 65)

3. Teori Keunggulan Kompetitif

Teori ini dikemukakan oleh Michael E. Porter yang mengatakan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan langsung antara dua faktor produksi (misalnya : sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah) yang dimiliki oleh suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Dalam era persaingan global saat ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan kompetitif dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki 4 faktor penentu, yaitu (Hady, 2001: 58-59) :

a. kondisi faktor produksi

kondisi faktor produksi adalah sumber daya yang dimiliki suatu negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, modal dan infrastruktur,

b. kondisi permintaan

adapun kondisi permintaan meliputi komposisi permintaan dalam negeri, ukuran dan pola pertumbuhan permintaan dalam negeri, kecepatan pertumbuhan pasar dalam negeri, dan kecenderungan permintaan internasional,

c. keberadaan industri pendukung yang berkaitan

untuk menjaga dan memelihara kelangsungan keunggulan kompetitif, perlu selalu dijaga hubungan dan koordinasi dengan pemasok, terutama untuk menjaga dan memelihara *value chain*,

d. strategi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan persaingan.

strategi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan persaingan di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi keunggulan kompetitif.

2.2. Definisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah investasi, atau juga yang berbentuk sisa pendapatan sesudah dikurangi dengan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan *saving* rumah tangga (Soediyono, 1995: 4).

2.2.1. Beberapa Istilah Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing.

2. Produk Nasional Bruto

Produk Nasional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung.

2.2.2. Perkiraan Pendapatan dan Produk Nasional

Perkiraan pendapatan dan produk nasional merupakan rekening atau perkiraan, atau juga bisa disebut *account*, yang memuat komponen pendapatan nasional dan komponen produk nasional (Soediyono, 1995: 15-19).

1. Produk Nasional

Tiap komponen produk nasional mencerminkan macam penggunaan hasil produksi yang dihasilkan oleh perekonomian dengan kata lain tiap komponen menunjukkan besarnya pengeluaran dari masing-masing sektor dalam perekonomian. Dalam masa sekarang setiap perekonomian bangsa mengenal empat sektor, yaitu :

- a. pengeluaran konsumsi (C) meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka,
- b. pengeluaran investasi (I) merupakan semua pengeluaran domestic yang dilakukan sektor swasta untuk mendirikan bangunan-bangunan baru, mesin-mesin baru beserta perlengkapannya dan perubahan jumlah berbagai macam persediaan perusahaan,
- c. pengeluaran pemerintah (G) merupakan pengeluaran di mana pemerintah secara langsung memperoleh balas jasa atas pengeluaran tersebut,
- d. ekspor netto ($X - M$) merupakan hasil pengurangan nilai total impor (M) terhadap nilai total ekspor (X).

2. Pendapatan Nasional Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

Komponen pembentukan pendapatan nasional terdiri dari berbagai jenis pendapatan yang diperoleh para pemilik sumber daya sebagai imbalan keikutsertaannya dalam pembentukan produk nasional. Pada garis besarnya dibedakan empat unsur pendapatan nasional, yaitu (Soediyono, 1995: 19-20) :

- a. upah dan gaji (Y_w) merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional,

- b. sewa (Y_r) merupakan semua macam sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak lain atau oleh pemiliknya sendiri, kecuali kalau pihak penerima sewa merupakan perusahaan,
- c. bunga (Y_i) merupakan semua pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta, baik sektor keluarga maupun sektor perusahaan,
- d. laba (Y_p) merupakan perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan perusahaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan per tahun.

3. Pendapatan Nasional dari Harga Biaya Faktor ke Harga Pasar

Penghubung antara pendapatan nasional atas dasar biaya faktor produksi dengan pendapatan nasional atas dasar harga pasar, terdiri dari : transfer pemerintah, pajak tidak langsung, subsidi dan penyusutan (Soediyono, 1995: 23-24).

- a. transfer perusahaan adalah semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa,
- b. pajak tidak langsung merupakan suatu pajak apabila oleh pembayar pajak beban pajak tersebut dialihkan kepada pihak lain,
- c. subsidi merupakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, demi kepentingan nasional di mana perusahaan-perusahaan tersebut masih perlu dipertahankan,

- d. penyusutan adalah menurunnya nilai-nilai kapital perusahaan-perusahaan setiap tahunnya.

2.2.3. Pendapatan Nasional Harga Berlaku dan Harga Tetap

1. Pendapatan Nasional Harga Berlaku

Pendapatan Nasional pada harga berlaku adalah nilai barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam satuan tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.

2. Pendapatan Nasional Harga Tetap (Riil)

Pendapatan Nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil yaitu nilai barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam satuan tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.

2.3. Definisi Kurs

Definisi singkat dari kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2004: 397).

2.3.1. Teori Kurs

Hubungan internasional yang dilakukan oleh setiap negara dalam konteks perdagangan internasional akan membawa konsekuensi bahwa

terdapat perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan tersebut harus dicarikan solusinya yaitu dengan ditetapkannya suatu kesepakatan mengenai harga suatu produk dalam mata uang masing-masing, sehingga diperlukan nilai tukar dari setiap mata uang. Nilai tukar inilah yang disebut dengan sistem kurs. Sistem nilai tukar ini bermacam-macam antara lain kurs tetap (*fixed exchange rate*), kurs fleksibel (*floating exchange rate*), serta kombinasi keduanya (*manage floating rate*). Adapun pemilihan sistem kurs yang akan diaplikasikan tidak terlepas akan adanya resiko (Kelana, 1996: 29-30).

Kurs tetap diberlakukan di mana bank sentral menetapkan harga valuta asing (valas) dan bersedia membeli atau menjual valas pada harga tersebut. Untuk kasus jika terjadi perubahan permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah (Bank Sentral) akan melakukan intervensi dengan cara menambah penawaran dari permintaan mata uang yang meningkat tersebut dan sebaliknya sehingga keseimbangan dapat terjaga.

Kurs fleksibel terjadi bila kebijakan pemerintah (Bank Sentral) membiarkan kurs untuk melakukan penyesuaian nilai tukarnya sehingga kurs dapat menyeimbangkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang. Mekanisme penyesuaian ini dibiarkan secara natural (mekanisme pasar).

Kurs mengambang terkendali adalah jika terjadi kenaikan permintaan uang maka pemerintah selain membiarkan perubahan kurs tetapi juga melakukan intervensi dengan cara menaikkan penawaran uang

sehingga kurs berubah tidak terlalu besar. Tujuan ditetapkannya kurs mengambang terkendali adalah agar kurs tidak dibiarkan melonjak drastis.

2.3.2. Penetapan Nilai Tukar

1. Kurs Efektif

Pengukuran nilai kurs pada umumnya dipengaruhi oleh besarnya volume perdagangan negara tersebut. Pengukuran ini dipengaruhi pula oleh perubahan tingkat harga yang berlaku pada suatu negara dibandingkan perubahan tingkat harga pada negara partner dagangnya.

Kurs efektif dapat ditulis sebagai berikut (Kelana, 1996: 272) :

$$Ke = E P^f / P$$

di mana :

Ke = kurs efektif

E = kurs normal

P^f = tingkat harga/inflasi luar negeri

P = tingkat harga/inflasi dalam negeri.

2. *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli)

Kurs ini untuk menjaga tingkat kurs efektif (kurs riil). Suatu negara dapat mengubah nilai kursnya sebesar perubahan rasio inflasi. Intinya bahwa kurs berubah terutama merefleksi perbedaan inflasi antar negara.

$$E = P / P^f$$

3. *Currency Board System* (CBS)

Menurut sistem ini nilai kurs harus ditentukan/dipatok, konsekuensinya Bank Sentral harus mempunyai cadangan devisa cukup besar. Selanjutnya adalah kondisi tersebut membawa dampak bahwa Bank Sentral harus memenuhi kebutuhan valas di pasar berapapun jumlahnya.

2.4. Definisi Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang besar, bukanlah merupakan inflasi. (Nopirin, 1997: 25).

2.4.1. Indeks Harga

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain indeks harga biaya hidup, indeks harga perdagangan besar, dan GNP deflator (Nopirin, 1997: 25-26).

1. Indeks Harga Hidup (*Consumer Price Index*)

Indeks Harga Hidup mengukur biaya/pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat bermacam-macam. Di Indonesia dikenal indeks 9 bahan pokok, 62 macam barang serta 162 macam jasa. Karena arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi seseorang itu tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimbang tertentu. Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku, atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan/searah dengan indeks biaya hidup.

3. GNP deflator

GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya dibanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP riil}} \times 100$$

2.4.2. Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan-perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukan perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Sukirno, 2004: 152):

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

- π = laju inflasi
- IHK_t = Indeks harga konsumen tahun ke t
- IHK_{t-1} = Indeks harga konsumen tahun ke t-1 (tahun lalu).

2.4.3. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga –harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu Inflasi tarikan Permintaan, Inflasi Desakan Biaya, dan Inflasi diimpor (Sukirno, 2004: 333-336).

1. Inflasi tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

3. Inflasi diimpor

Inflasi juga dapat bersumber dari barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Kenaikan harga barang impor akan

menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga.

2.4.4. Teori-teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di jaman yang modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam inflasi dari:

a. jumlah uang yang beredar

inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini, misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga-harga tersebut,

b. psikologi (*expectations*) masyarakat mengenai harga-harga

laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Yang kedua adalah di mana

masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961-1966 (Boediono, 1995: 161-162).

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*).

Inflationary gap timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana.

Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut bisa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh (Boediono, 1995: 163-165).

3. Teori Strukturalis

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang” (Boediono, 1995: 167-169).

Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan:

- a. teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang,
- b. ada asumsi bahwa jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya

apabila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya,

c. faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100 persen struktural. Sering dijumpai bahwa ketegaran-ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

2.5. Hubungan Impor Dengan Variabel Makro Lain

Analisis makro ekonomi menyatakan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga, maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional maka persamaan fungsi impor adalah $M = mY$, di mana m menggambarkan tingkat perubahan nilai impor akibat dari perubahan pendapatan nasional. Kedua, dapat pula dimisalkan sebagian dari impor luar negeri tidak dipengaruhi pendapatan nasional, maka persamaan fungsi impor adalah $M = M_0 + mY$, di mana M_0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dalam model tersebut pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap impor. Artinya jika pendapatan nasional naik maka impor cenderung akan naik (Sukirno, 2004: 207).

Impor juga dipengaruhi oleh besarnya nilai tukar (kurs). Menurunkan nilai mata uang merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Hal ini akan mendorong

ekspor negara dan mengurangi impornya, dengan demikian akan mendorong produksi barang pengganti impor di negara itu. Akibat kenaikan produksi dan pendapatan negara, akan mendorong kenaikan impor. Dengan demikian nilai tukar berpengaruh negatif terhadap impor karena nilai tukar merupakan harga valuta asing dalam satuan mata uang domestik. Jika nilai tukar naik maka harga barang impor akan naik dalam satuan mata uang domestik, sehingga impor akan turun (Salvatore, 1992:150).

Inflasi juga mempengaruhi impor, meningkatnya laju inflasi menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Ini mendorong masyarakat membeli lebih banyak barang impor (Sukirno, 2004: 208).

Krisis ekonomi ditandai dengan tingginya angka inflasi atau terjadi hiperinflasi. Tingginya inflasi menyebabkan kenaikan harga dalam negeri. Hal ini akan menyebabkan impor semakin meningkat, keterbukaan impor semakin besar, dan ketergantungan terhadap barang impor (Atmadji, 2004: 45).